

Pemkot Bekasi Sasar Apartemen untuk Razia Prostitusi Online

BEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi kini membidik seluruh apartemen di Kota Bekasi seiring dengan maraknya prostitusi online. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berujar, pihaknya akan menginventarisasi seluruh apartemen untuk melihat perzinahan dan peruntukannya.

"Tentu semua akan kami minta pertanggungjawaban pengelola dan akan kami inventarisasi kalau memang ada (prostitusi online)," ujar Tri kepada awak media, Selasa (3/1).

Tri mengaku belum menerima laporan soal maraknya prostitusi online di apartemen. Namun, dia menyebutkan bahwa Pemkot Bekasi akan memulai penindakan dari tingkat paling bawah. "Saya perintahkan dari yang terkecil, yaitu lurah dan camat, untuk melakukan inventarisasi dan klarifikasi dengan apartemen yang ada," sebut Tri.

Jika berdasarkan hasil inventarisasi ditemukan pelanggaran, maka penindakan akan langsung dilakukan. "Tentu ada prosesnya dulu (sebelum ditindak). Ada peringatan yang pertama hingga yang ketiga. Setelah itu, apabila masih melanggar, akan langsung ditindak," ucap Tri.

Tri menyampaikan itu menanggapi dugaan prostitusi di sebuah apartemen pada malam tahun baru, Minggu (1/1). Saat itu, seorang pria berinisial FH (18) tewas ditusuk setelah menunggu temannya, NF, yang sedang berkenalan dengan pekerja seks komersial (PSK) di lantai 15 sebuah apartemen. Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari berujar, saat itu FH sedang menunggu NF di parkir motor.

Tak lama berselang, temannya turun dari lantai 15 karena terlibat cekcok dengan sejumlah orang. "Teman korban ini pesan PSK lewat aplikasi MiChat dan korban menunggu di parkir. Tapi, enggak lama setelah itu, temannya turun karena sudah cekcok ketika berada di lantai 15," ujar Erna, Senin (2/1).

Keributan itu pun berlanjut. Korban dan temannya terus diikuti hingga korban ditusuk para pelaku.

"Satu orang menusuk korban hingga meninggal dunia, sementara yang lain mengeroyok rekan korban," ujar Erna.

Polisi kemudian menangkap lima pelaku DA (18), AN (20), MR (19), ER (19), dan T (17) tak lama setelah kejadian. • yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PELUNCURAN TIM VOLI JAKARTA BNI 46

Direktur Human Capital & Compliance BNI sekaligus Pembina tim bola voli Jakarta BNI 46, Mucharom (kedua kiri) didampingi Direktur Network & Services BNI Ronny Venir (kiri) memberikan bola kepada Manajer tim bola voli putra Jakarta BNI 46 Agus Junggungan Marbun (kanan) saat peluncuran di Menara BNI, Jakarta, Selasa (3/1). BNI memperkenalkan 18 pebola voli yang memperkuat tim bola voli Jakarta BNI 46 yang berpartisipasi dalam ajang Proliga 2023 dengan menargetkan juara.

Heru Budi: Harus Ada Relokasi Warga untuk Pembangunan Tanggul Pantai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membahas pembangunan tanggul pantai bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pembahasan dilakukan karena Pemprov DKI bakal membuat sertifikat tanah di garis pantai yang ditanggul.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan, bakal ada warga yang direlokasi demi kelanjutan pembangunan tanggul pantai. Heru mengungkapkan hal ini usai menggelar rapat pimpinan (rapim) berkait pembangunan tanggul di Balai

Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Dalam kesempatan itu, Heru belum mengungkapkan secara rinci berapa banyak warga yang akan direlokasi untuk melanjutkan pembangunan tanggul pantai. "Kalau tanggul pantai, ada beberapa hal yang memang spot-spot tertentu

harus ada perpindahan warga," sebutnya.

Heru hanya berujar bahwa dia akan bijak dalam proses relokasi warga untuk pembangunan giant sea wall. "Ya, kami bijak lah untuk itu," ungkapnya. Heru menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membahas pembangunan tanggul pantai bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pembahasan dilakukan karena Pemprov DKI bakal membuat sertifikat tanah di garis pantai yang ditanggul.

Kemudian, menurut dia, pembangunan tanggul pantai baru akan rampung pada 2025. "Karena kan ketika kami sudah menanggul pantai, ada lahan

timbul yang milik Pemda DKI. Itu harus cepat kami sertifikatkan, yang dekat dengan Pelindo," tuturnya.

(Pembangunan) tanggul pantai (rampung) 2025," sambung Heru. Selain pembangunan tanggul pantai, pembangunan tanggul laut raksasa (*giant sea wall*) juga menjadi bahasan saat rapim.

Heru menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang memantapkan kembali konsep pembangunan giant sea wall. Menurut dia, pematangan konsep akan rampung tiga bulan

ke depan atau pada April 2023. Adapun pematangan konsep dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Heru mengungkapkan, untuk memantapkan konsep, Bappeda DKI Jakarta akan menemui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Konsep perencanaannya harus segera. Habis ini ke Bappenas, diskusi dengan para jementerian terkait, ada Kementerian Kelautan, Lingkungan Hidup, dan seterusnya," urainya. • yan

Tinjau Ruang Hijau di Tol Becakayu, Heru Pastikan Penataan RTH Berjalan

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau proses penanaman pohon dan pembuatan taman di area Jalan Inspeksi Kalimalang, tepatnya di sepanjang kolong Tol Becakayu, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Selasa (3/1) pagi.

Hal itu dilakukan untuk memastikan penataan kawasan hijau di Jakarta terus berjalan, sehingga bisa memberi kenyamanan dan kesegaran bagi warga yang melewati kawasan tersebut.

Dalam peninjauan ini, Heru didampingi Camat Makassar, Kamal Alatas dan Lurah Cipinang Melayu, Arroyantoro beserta jajaran, guna memastikan progres kegiatan penghijauan di kawasan tersebut berjalan tepat sasaran.

"Terima kasih kepada Pak Camat dan Pak Lurah yang sudah memantapkan kegiatan penghijauan di sini. Saya harap penanaman pohon di kolong tol Becakayu terus dilanjutkan. Hal ini juga sebagai salah satu indikator kinerja, untuk penataan kawasan tingkat

kecamatan dan kelurahan," ujar Heru.

Selain itu, Heru juga berpesan kepada jajaran Kecamatan Makassar dan Kelurahan Cipinang Melayu untuk terus menjaga keasrian dan keindahan lingkungan di kawasan penghijauan kolong Tol Becakayu ini. Keasrian dan keindahan tersebut, menurut Heru, juga berdampak pada sektor ketahanan pangan kota melalui kegiatan urban farming di kawasan tersebut.

"Selain memberikan keasrian dan keindahan, kegiatan urban farming di kawasan tersebut juga bisa membantu kita dalam memberdayakan ketahanan pangan di Kota Jakarta. Maka dari itu perlu dipertahankan. Urban Farming ini tidak hanya layak dipertahankan, namun juga perlu dikembangkan," tambah Heru.

Perlu diketahui, penghijauan di area kolong Tol Becakayu telah dilakukan sepanjang 2,7 km dari total yang akan dihijaukan 5 km. Heru berharap sisa pengerjaan penanaman pohon dan tumbuhan hijau lainnya dapat selesai sesuai target. • yan

Ditolak DPRD DKI, Pelican Crossing Dekat Perpustakaan Batal Digeser

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta batal merelokasi pelican crossing dekat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) ke depan Plaza Selatan Monas usai mendapat sorotan dari DPRD. Jadi, lokasi *existing* penyeberangan jalan tetap dipertahankan di posisi semula.

"Itu *existing* kembali lagi ke awal, jadi enggak lewat taman tengah tapi dari situ langsung," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Hari mengakui niat ini diurungkan usai menerima masukan dari DPRD DKI Jakarta. Sebab, DPRD memandang pergeseran pelican crossing bakal merusak taman.

"Pertimbangkan saran DPRD, kalau digeser merusak taman tengah, jalannya dari Balkot toh udah bagus. *Nggak* ada masalah," ujarnya.

Hari menjelaskan sejatinya pergeseran pelican *crossing* ini bersamaan dengan rencana membangun kawasan hijau di median jalan sepanjang Jalan Merdeka Selatan. Namun, pi-

haknya menerima setiap saran dan masukan dari berbagai pihak.

"Konsep awalnya kan itu mau dibikin kawasan hijau, dipindah ke arah sisi sana, kita geser ke arah Plaza Monas, tapi kalau pertimbangannya begitu ya enggak masalah," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta menolak rencana pemindahan pelican crossing dekat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) ke depan Plaza Selatan Monas di Jalan Merdeka Selatan. Pasalnya, lokasi *existing* penyeberangan jalan saat ini dinilai sudah tepat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah saat meninjau langsung lokasi pelican crossing Jalan Merdeka Selatan pada Jumat (9/12) lalu. Sejuah ini, kata dia, keberadaan pelican crossing bermanfaat bagi masyarakat yang hendak berjalan menuju halte TransJakarta ataupun taman parkir IRTI Monas.

"Saya pikir tidak perlu ada pergeseran, biarkan saja yang sudah ada ini," ujar Ida. • yan



FOTO: ANT

OMZET JASA PENCUCIAN SEPEDA MOTOR MENINGKAT

Pekerja mencuci motor milik pelanggan pada jasa cuci motor di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (3/1). Menurut pemilik, pada musim penghujan jasa pencucian motor dengan biaya Rp18.000 hingga Rp30.000 per motor tergantung jenis motornya tersebut mengalami peningkatan omzet hingga 50 persen.

BPBD Siapkan Pompa hingga Lokasi Pengungsian Hadapi Banjir Rob Jakarta

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi banjir rob yang berpotensi terjadi di pesisir utara Jakarta beberapa hari mendatang.

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI, Michael Sitanggang telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk kesiapan personel dan peralatan di lapangan.

"Koordinasi dengan BMKG, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan para Lurah terkait kesiapan personel dan peralatan seperti pompa mobile dan stasioner untuk siap difungsikan menyedot air rob," kata Michael saat dihubungi, Selasa (3/1).

BPBD nantinya akan menyiapkan personel Petugas Penganggulangan Bencana/TRC pada kelurahan rawan rob dengan dukungan personel dari organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

BPBD juga telah memastikan lokasi pengungsian serta sarana dan prasarana pendukung penanganan banjir yang berada di kelurahan rawan banjir rob.

"Seperti perahu, ring buoy, jaket pelampung, dan lain-lain siap untuk difungsikan untuk membantu masyarakat apabila dibutuhkan,"

kata dia.

Layanan kedaruratan 24 jam melalui Jakarta Siaga 112 juga akan disiapkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.

"Memberikan informasi dinamika kondisi tinggi gelombang laut melalui website, media sosial, WhatsApp Group dan Channel Telegram," katanya.

BPBD sebelumnya mengingatkan warga di pesisir utara Jakarta untuk waspada potensi banjir rob yang berlangsung pada periode 3-10 Januari 2023.

"Waspada banjir pesisir. Durasi: 03 Januari s.d 10 Januari 2023," tulis BPBD dalam unggahan di akun instagram resmi, Minggu (1/1).

Berdasarkan informasi dari BMKG, BPBD menyebut bahwa ada fenomena bulan purnama (*full moon*) pada 6 Januari 2023 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, di antaranya pesisir utara DKI Jakarta.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut," tulis BPBD. • yan

Heru Budi Diminta Tindak Dugaan Jual-Beli Rusunawa Penjaringan

JAKARTA (IM) - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diharapkan menindak dugaan jual-beli Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) Penjaringan, Jakarta Utara. Persoalan ini diduga melibatkan pejabat terkait yang mengelola rusunawa. Perkara ini telah diadukan kepada Heru, melalui layanan pengaduan yang dibuka di Balai Kota DKI.

"Kami mohon agar Bapak Heru Budi Hartono mengusut tuntas dan menindak tegas pihak-pihak yang diduga bermain di Rusunawa Penjaringan," ujar kuasa hukum papelor, Saiful Bakhril, Selasa (3/1). Masalah ini bermula saat kliennya, mengajukan permohonan untuk memperoleh unit Rusunawa Penjaringan. Kendati telah diajukan sejak beberapa tahun lalu, hingga kini kliennya tak mendapatkan unit di rusunawa tersebut.

"Sejak tahun 2017, klien kami mengajukan berkas untuk dapat menghuni Rusunawa Penjaringan, namun hingga saat ini permohonan saya tak kunjung terealisasi. Klien saya ini jelas-jelas pemilik KTP DKI, tapi kok malah warga luar DKI yang dapat? Ini kan aneh, diduga kuat ada

permainan," kata Saiful.

"Klien kami memiliki bukti, ada pasutri warga pemilik KTP Riau berinisial MP dan ABY. Keduanya bukan asli warga DKI Jakarta, tapi kini kedua ini dapat menghuni Rusunawa Penjaringan tepatnya di Tower A/19.

Berdasarkan data yang kami miliki, keduanya juga sudah memiliki KTP DKI. Keduanya mutasi sebagai warga DKI setelah berselang tidak lama memperoleh kunci Rusunawa," sambungnya.

Saiful menjelaskan, pada Pergub DKI Jakarta No.111 Tahun 2014 disebutkan ada tiga kriteria untuk dapat menempati Rusunawa. Yaitu masyarakat yang terkena relokasi, revitalisasi dan masyarakat umum.

"Untuk relokasi merupakan hak warga yang digusur kemudian direlokasi ke sejumlah rusunawa yang dikelola Pemprov DKI. Kemudian revitalisasi salah satu rusunawa yang sudah selesai direvitalisasi Pemprov DKI adalah Rusun Penjaringan," jelasnya.

"Dan untuk umum, jelas itu hak warga DKI Jakarta yang telah memiliki KTP DKI, dan terdaftar di aplikasi SIRUKIM," imbuh Saiful.

Karena itu, pihaknya men-

duga adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun IV DPRKP Provinsi DKI. "Diduga telah menyalahgunakan jabatan secara administratif, sehingga Pj DKI harus menindak tegas," tuturnya.

Adapun pengaduan pihaknya telah tertuang dalam dua berita acara. Pertama, pengaduan dalam bentuk berkas dan bukti-bukti yang diterima oleh Arif Hermawan, staf Unit Bagian Pengaduan di Balai Kota. Dimana, kata dia nantinya berkas dan bukti tersebut akan dilimpahkan dan ditindaklanjuti ke inspektorat yang berwenang dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Selanjutnya, laporan ke Unit Bagian Informasi dan Pengaduan, yang diterima langsung laporan tersebut oleh petugas Bagian Informasi Pengaduan, dalam bentuk tanda terima. Pihaknya pun berharap kepolisian maupun kejaksaan turut menyelidiki dugaan penyimpangan ini.

"Kami tak segan-segan untuk menindaklanjuti laporan ini ke Presiden Jokowi, jika memang tak ditindaklanjuti oleh Pj. Gubernur DKI," tandas Saiful. • yan



FOTO: ANT

PENATAAN KABEL UTILITAS BINA MARGA

Petugas Dinas Bina Marga memotong kabel utilitas di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (3/1). Penataan kabel utilitas tersebut untuk mendukung penyelenggaraan infrastruktur digital dan penataan Jakarta menuju Kota Pintar (Smart City), serta mewujudkan kerapian kota agar selaras dengan kaidah tata ruang, kelestarian dan estetika.

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para kreditur dan karyawan PT MAHKOTA MEGA FORESTA (Perseroan) bahwa PT KONSERVASI HUTAN INDONESIA berencana mengambil alih mayoritas saham yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan.

Para kreditur dan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan tertulis sehubungan dengan pengalihan saham ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

PT Mahkota Mega Foresta
Kebayoran Icon Office,
Jl. Cileug Raya No. 35, Kelurahan Cipinang,
Kecamatan Kembangan Lama, Jakarta Selatan

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, [4 Januari 2023]
Hormat Kami,
PT Mahkota Mega Foresta
Direksi